RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERIODE 2020 – 2024

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kerjasama seluruh pihak dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unit kerja baru dapat menyusun dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024. Dokumen ini merupakan Rencana Strategis tingkat unit kerja eselon 1 untuk 5 (lima) tahun yang disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Koordinasi Kemaritiman dan Investasi periode 2020-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya mulai penyusunan rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja dan rencana aksinya serta mencakup strategi pelaksanaan yang meliputi sumberdaya manusia, perencanaan anggaran maupun sarana dan prasarana dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik.

Semoga dokumen rencana strategis ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana maksud tersebut di atas.

Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2020

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Nama	Paraf
1		
2		

Odo R.M Manuhutu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024. Rencana Strategi ini berisi langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Definisi pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan definisi ekonomi kreatif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi

Indonesia adalah negara kepulauan besar yang memiliki luas wilayah 8.300.000 km2 dan sebagian besar (77%) diantaranya atau seluas 6.400.000 km2 merupakan wilayah perairan laut. Wilayah laut ini meliputi zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, zona tambahan, dan perairan landas kontinen. Panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km dengan jumlah pulau tidak kurang dari 17.504 buah.

Pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap yang dimulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam rangka menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan rencana pembangunan yang memiliki visi jauh kedepan, dengan didasari kondisi saat ini. Rencana strategis pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ini merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 khususnya dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan dapat memberikan arah panduan pelaksanaan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam kurun waktu 2020-2024 dan selaras dengan RPJMN 2020-2024 serta pembangunan kemaritiman jangka panjang 2020-2045 (Visi Maritim 2045).

1.2. Capaian Kinerja

1.3. Potensi

1.4. Permasalahan

1.5. Tugas, Fungsi, Kewenangan

1.6. Identifikasi Lingkungan

Identifikasi lingkungan dilakukan untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencakup kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (thread). Berikut adalah identifikasi yang dilakukan yaitu:

A. Kekuatan

1) Mandat yang Jelas

Salah satu faktor penting dalam melaksanakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah adanya mandat dan/atau amanat yang sangat jelas dan tegas. Dalam beberapa kesempatan Presiden menyampaikan visi dan misinya yang harus dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu: mewujudkan Indonesia poros maritim dunia dengan lima pilar yang menyangkut (1) pembangunan budaya maritim, (2) pengelolaan sumberdaya laut untuk ketahanan pangan, (3)

pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, dan (5) pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

2) Perbedaan Latar Belakang Pegawai

   ASN Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berasal dari beberapa unit kerja di Kemenko Marves dan sebelumnya sebagian ASN berasal dari instansi K/L lain yang ternyata dapat memberikan kontribusi dalam keanekaragaman pemikiran dan luasnya jejaring yang diperlukan dalam melakukan sinkronisasi, kordinasi dan pengendalian bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

3) SDM yang berkualitas

   Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada akhir tahun 2019 didukung dengan 332 ASN, 183 diantaranya (lebih dari 55%) adalah staf pelaksana yang merupakan hasil rekrutmen 3 (tiga) tahun terakhir yang dilaksanakan secara ketat dan selektif. Proses rekrutmen yang baik ini hasilnya didominasi oleh ASN muda yang berkualitas dan berjiwa milenial sehingga berpotensi untuk dikembangkan.

   Selain itu rekrutmen pejabat, khususnya untuk jabatan tinggi, juga dilakukan dengan proses rekrutmen terbuka yang baik melalui lelang jabatan. Proses ini memberi kesempatan kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mendapatkan pejabat yang berkualitas, yang kompeten di bidangnya.

4) Organisasi dan Kelembagaan telah diperkuat

   Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Kementerian Koordinator dengan 3 (tiga) Biro, 4 (empat) Deputi Bidang Koordinasi yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 4 (empat) Asisten Deputi, 4 (empat) Staf Ahli dan 1 (satu) Inspektorat. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan pada tahun 2019, Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diperkuat menjadi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Kementerian Koordinator dengan 4 (empat) Biro, 6 (enam) Deputi Bidang Koordinasi yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi, 4 (empat) Staf Ahli dan 1 (satu) Inspektorat. Organisasi baru ini telah disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. Kelemahan

1) Keterbatasan Pegawai

Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif per 1 September 2020 berjumlah 30 orang yang terdiri dari seluruh level jabatan struktural dan fungsional dan masih terdapat beberapa posisi jabatan yang belum diisi.

2) Anggaran

Kondisi pandemi COVID-19 membuat perekonomian negara sangat terdampak karena anggaran banyak tersedot untuk mengatasi dampak pandemi, sehingga anggaran instansi mengalami penurunan, termasuk juga di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keterbatasan anggaran harus dihadapi dalam

3) Budaya Kerja

Sebagai unit kerja yang baru terbentuk, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi oleh ASN yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta dari instansi lain. Dari berbagai latar belakang ASN tersebut hanya sebagian saja yang sudah pernah menangani bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun ASN Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hasil rekrutmen umumnya memiliki

budaya kerja generasi millennial yang lebih luwes dan tidak birokratis tetapi berorientasi hasil. Oleh karena itu perlu dibuat budaya kerja baru Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan mengambil nilai-nilai positif dari instansi asal ASN Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4) Kebergantungan pada tenaga kerja kontrak

Pada awal terbentuknya Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini belum memiliki ASN dalam jumlah yang cukup. Untuk memenuhi kekurangan pegawai dilakukan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan kontrak yang notabene non ASN. Hal tersebut di atas perlu diantisipasi dengan melakukan rekrutmen pegawai yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, khususnya untuk tenaga adminsitrasi. Rekrutmen pegawai selama ini lebih berorientasi untuk merekrut tenaga teknis dengan kualifikasi Pendidikan sarjana S1 ke atas. Kualifikasi demikian melebihi kualifikasi untuk tenaga administrasi.

C. Peluang

1) Sumber Kekayaan Alam

Wilayah perairan dan kepulauan kita banyak mengandung potensi kekayaan alam antara lain sumber daya hayati yang meliputi ikan dan biota air lainya, sumber daya mineral, sumber daya minyak dan gas, sumber daya pesisir, pariwisata bahari, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga banyak mengandung potensi energi, baik energi konvensional maupun energi terbaruukan, seperti energi bayu, energi surya, energi panas laut, energi ombak, dan lain-lain.

2) Potensi Ekonomi Maritim

Letak geografis Indonesia pada posisi silang antar dua benua dan dua samudera besar serta kekayaan alam yang dikandungnya, memberikan keuntungan secara ekonomi. Indonesia berpotensi mengembangkan berbagai industri maritim, termasuk industri perkapalan, industri migas dan industri manufaktur serta industri pengolahan sumber daya alam, dan jasa kelautan yang meliputi perikanan, pariwisata, pelayaran, perdangan internasional, dan bentuk jasa lainya.

D. Tantangan

1) Tingginya Diversitas

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman yang tinggi, baik keanekaragaman suku, keanekaragaman ras dan budaya, kearifan lokal, keanekaragaman hayati, keanekaragaman topografi, maupun keanekaragaman sumber daya alam yang terdapat di perairan Indonesia. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman yang ada untuk dijadikan kekuatan dan membangun sinergi sehingga justru membawa manfaat yang lebih besar.

~~2) Potensi Bencana~~

~~Dalam hal kebencanaan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Saat ini setidaknya terdapat dua jenis bencana, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh fenomena alam seperti tsunami, badai, abrasi pantai, dan bencana industri sebagai akibat aktivitas ekonomi manusia seperti polusi lingkungan. Bencana alam tidak dapat dicegah, namun dapat dikurangi dampaknya. Bencana industri dapat dikendalikan dengan membangun industri yang ramah lingkungan.~~

~~3) Potensi Ancaman Keamanan~~

~~4) Disparitas Investasi~~

I.1 Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Ekonomi kreatif berkembang secara resmi di Indonesia sejak tahun 2006 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.[6] Proses pengembangan ini diwujudkan pertama kali

dengan pembentukan Indonesian Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.[7] Pada tahun 2007 dilakukan peluncuran Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia 2007 pada Trade Expo Indonesia.[8]

Pada tahun 2008, dilakukan peluncuran Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 dan Cetak Biru Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif Indonesia.[8] Selain itu, dilakukan pencanangan tahun Indonesia Kreatif 2009.[8]. Perkembangan ekonomi kreatif kemudian berlanjut pada tahun 2014 sd 2019 saat Presiden Joko Widodo membentuk secara khusus Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mengembangkan bidang ekonomi kreatif. Sejak 2019 dilebur kembali dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

II.1 Perkembangan Instansi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dimulai sejak tahun 1959 dengan berbagai nama sebagai berikut:

a) Tahun 1959 sd 1960 bernama Kementerian Muda Perhubungan Darat, Pos, Telegraf, dan Telepon;

b) Tahun 1960 sd 1962 bernama Kementerian Perhubungan Darat, Pos, Telegraf, dan Telepon;

c) Tahun 1962 sd 1966 bernama Kementerian Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata;

d) Tahun 1966 bernama Kementerian Pos dan Telekomunikasi kemudian berganti menjadi Kementerian Pariwisata, dan berganti lagi menjadi Kementerian Perhubungan Departemen Pos dan Telekomunikasi;

e) Tahun 1983 sd 1988 bernama Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

f) Tahun 1988 berganti nama menjadi Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya;

g) Tahun 1988 sd 1999 bernama Kementerian Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya;

h) Tahun 1999 sd 2001 bernama Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian;

i) Tahun 2001 sd 2004 bernama Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

j) Tahun 2004 sd 2011 bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

k) Tahun 2011 sd 2014 bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

l) Tahun 2014 sd 2019 terdapat Kementerian Pariwisata dan juga terdapat sebuah badan bernama Badan Ekonomi Kreatif;

m) Tahun 2019 sd sekarang bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

III.1 Capaian Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif periode 2015-2019 sudah memberikan beberapa pencapaian sebagai berikut:

Perwujudan Indonesia Poros Maritim Dunia Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa digambarkan oleh 2 (dua) keadaan, yaitu pertumbuhan ekonomi maritim dan kinerja logistik. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2019, pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia mencapai 4,8%. Penghitungan kontribusi PDB Maritim diperoleh dengan menghitung dari tahun 2010 sebagai tahun dasar, dimana pada tahun 2010 nilai PDB maritim adalah Rp 782 triliun atau 11,40% dari PDB nasional. Pada tahun 2018 nilai

ekonomi maritim menjadi sebesar Rp. 1.084 trilyun, atau konstribusi sekitar 10,41% dari PDB Nasional. Angka ini diperoleh dari 9 klaster utama sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Nilai dan kontribusi ekonomi Maritim*

Klaster	Nilai (milyar rupiah)	Kontribusi terhadap PDB Maritim	Kontribusi terhadap PDB Nasional	Nilai (milyar rupiah)	Kontribusi terhadap PDB Maritim	Kontribusi terhadap PDB Nasional
	2010			**2018**		
Perikanan	1.766,54	22,59%	2,58%	285.635,61	26,33%	2,74%
ESDM	3.721,54	47,59%	5,43%	403.307,24	37,17%	3,87%
Industri Bioteknologi	148,58	1,90%	0,22%	2.249,66	0,21%	0,02%
Industri Maritim	142,32	1,82%	0,21%	18.413,15	1,70%	0,18%
Jasa Maritim	530,20	6,78%	0,77%	97.115,65	8,95%	0,93%
Pariwisata	802,33	10,26%	1,17%	132.923,18	12,25%	1,28%
Perhubungan	444,18	5,68%	0,65%	76.787,01	8,08%	0,74%
Bangunan Laut	129,81	1,66%	0,19%	21.465,72	1,98%	0,21%
Hankam	349,55	4,47%	0,51%	47.073,63	4,34%	0,45%
PDB Maritim	**782.000**			**1.084.970,85**		**10,41%**
PDB Nasional	**6.859.649**			**10.425.316**		

Sumber: *Estimasi Kemenko Maritim Bersama P2Ekonomi LIPI, 2019*

Angka pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia memang masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang melebihi angka 5%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengusahaan kemaritiman saat ini seperti industri dan jasa maritim, serta pariwisata dan perhubungan yang memiliki potensi cukup tinggi. Gambar di bawah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi maritim dalam ekonomi nasional. Tampak bahwa sejak tahun 2010 meskipun *share* ekonomi maritim terus menurun, namun mulai tahun 2015 pertumbuhan ekonomi maritim cenderung meningkat.

Gambar 1.2: *Grafik pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia*

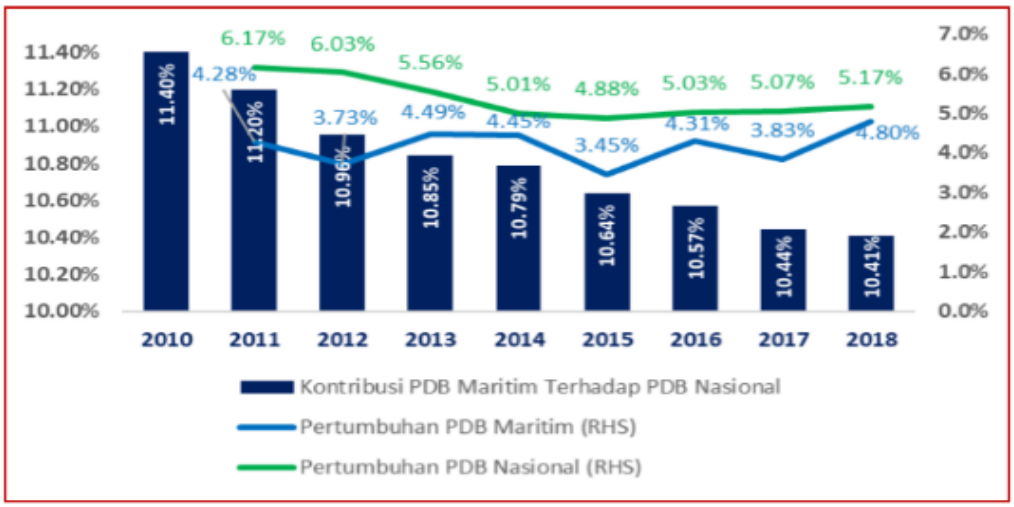

Sumber: *Estimasi Kemenko Maritim Bersama P2 Ekonomi LIPI, 2019*

a. Industri, Jasa dan Inovasi

Di bidang jasa dan pariwisata, kontribusi terhadap perekonomian nasional juga masih rendah. Jasa dan pariwisata juga baru mampu berkontribusi berturut-turut sebesar 0,93% untuk jasa dan 1,98% untuk pariwisata. Beberapa potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan pariwisata yaitu kekayaan dan keragaman sumber daya alam dan budaya, faktor kesejarahan berkaitan dengan momentum-momentum penting dalam sejarah dunia, pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan destinasi, indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif, atensi dan sikap positif masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan, dan citra positif yang terbangun melalui berbagai event dan peristiwa penting.

Sedangkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam pembangunan ekonomi kreatif adalah memiliki keragaman budaya yang tinggi mencakup kuliner, busana daerah, kriya, musik, dan seni pertunjukan. Potensi ini didukung keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner, bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan, dan jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik.

Permasalahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2020 ini sebagaimana juga dihadapi oleh sektor-sektor lainnya adalah mewabahnya pandemic corona virus (Covid-19) di seluruh dunia. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terberat terkena dampak pandemic Covid-19 baik dari segi *supply* dan *demand*

nya. Laporan terakhir UNWTO berdasarkan prediksi menggunakan skenario pandemic SARS tahun 2003 sementara diperoleh informasi bahwa kunjungan wisatawan internasional turun sebesar 20%-30% yang turun dari perkiraaan pertumbuhan sebesar 3%-4% pada Januari 2020. Penurunan ini diperkirakan akan menurunkan potensi pendapatan dari sektor ini secara internasional sebesar 30-50 Milyar USD.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang pada sektor non migas. Berdasarkan data pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 sektor pariwisata mampu menghasilkan devisa sebesar 224 Trilyun Rupiah untuk tahun 2018 dan 280 Trilyun Rupiah pada tahun 2019, yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 5.25% tahun 2018 dan 5,5% tahun 2019.

Untuk sektor ekonomi kreatif sesuai hasil survei Bekraf pada tahun 2016 mampu menyumbangkan 922,59 Trillyun Rupiah yang ekuivalen senilai 7,44% dari PDB yang sebagian besar berasal dari 5 sub sektor prioritas meliputi makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi.

b. Dukungan Kebijakan

Pencapaian pembangunan Kemaritiman sebagaimana tersebut di atas tentunya tidak lepas dari dukungan kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam periode 2015-2019. Dalam periode tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menghasilkan sekurang-kurangnya 47 kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya. Produk kebijakan yang dihasilkan dalam Program Kebijakan Pengembangan Kemaritiman selama Periode 2915-209 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1.1.4 Profil Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unit kerja eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya terkait pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Termasuk juga penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud serta tercapainya target pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi turut diperkuat juga dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tetang

Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam instruksi presiden dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan akif dalam memberikan pertimbangan dan perumusan kesepakatan antar kementerian/lembaga dalam setiap pengambilan kebijakan bidang Kemaritiman, dan Investasi meliputi:

1. Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan kementerian/lembaga yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat;
2. Kebijakan bersifat lintas sektoral dan luas kepada masyarakat;
3. Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Tiga (3) Arahan Presiden Jokowi kepada Menko Kemaritiman dan Investasi pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju, tanggal 23 Oktober 2019 yaitu:

1. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia"
2. Menangani hambatan-hambatan investasi
3. Merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar

Selanjutnya arahan Presiden Jokowi dipertegas dalam rapat terbatas (Ratas) ke-1, tanggal 23 Oktober 2019 terkait tugas Menko yang harus dilaksanakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu:

1. Investasi:
2. Energi:
3. Infrastruktur dan Konektivitas
4. Industri dan Maritim
5. Pariwisata
    a. Fokus/konsentrasi pada 5 lokasi, baik itu infrastrukturnya, kalender event, perbaikan produk berbasiskan ekonomi rakyat
    b. Target akhir tahun 2020, semua aspek yang memdukung sektor pariwisata harus rampung/selesai, antara lain: infrastruktur, pelabuhan, produk-produk wisata dan kalender event serta kondisi lingkungan yang menunjukan sebagai kawasan wisata

2) Potensi dan Permasalahan

~~Bangsa Indonesia sejatinya adalah Bangsa Bahari yang mendiami wilayah negara kepulauan. Oleh karena itu, masa depan Indonesia sesungguhnya ada di laut. Namun demikian, pada saat ini Indonesia belum maksimal memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimilikinya untuk menyejahterakan rakyatnya dan memperkokoh perekonomian nasional. Untuk dapat memanfaatkan potensi kemaritiman yang besar ini, bangsa Indonesia memiliki sejumlah masalah yang harus diselesaikan.~~

~~Potensi dan masalah tersebut antara lain sebagai konsekuensi bentuk wilayah dan posisi Indonesia yang sangat khas, sehingga wilayah negara Kepulauan Indonesia memiliki karakteristik yang unik, yaitu:~~

~~1) Indonesia merupakan satu satunya kepulauan besar, yang memiliki 17.504 pulau, yang terletak di sekitar katulistiwa;~~

~~2) Secara geografis Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar;~~

~~3) Secara geotektonik kepulauan Indonesia berada pada zona tumbukan 3 lempeng tektonik dan pada jalur cincin api.~~

1.2.1 Potensi dan Peluang

1.2.2 Kendala dan tantangan

1.2.3 Kekuatan

1.2.4 Kelemahan

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Visi adalah keadaan masa depan yang diinginkan oleh oleh suatu lembaga. Ini adalah kondisi ideal, yang mungkin sulit dicapai, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat. Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.**

Visi ini merupakan implementasi Visi Presiden RI: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

2. MISI

Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan, yang menggambarkan segala usaha dan/atau tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

Kelima Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diharapkan dapat melaksanakan agenda-agenda pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi dalam membangun NKRI menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkontribusi langsung pada Misi ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing dan berkontribusi tidak langsung pada Misi ke-1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia khususnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. TUJUAN

Tujuan pembentukan unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah untuk mengubah kondisi saat ini di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menuju kondisi yang diharapkan melalui sinkronisasi koordinasi dan pengendalian kebijakan sehingga dapat lebih meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional. Tujuan akhir yang diharapkan adalah terwujudnya pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, dan pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi nasional.

Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut dilakukan melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, pilar industry pariwisata dan ekonomi kreatif, pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pilar kreativitas.

~~Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi, potensi dan permasalahan yang ada serta arah pembangunan nasional, tujuan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah:~~

1) ~~Meneguhkan jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat;~~
2) ~~Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekenomian nasional;~~
3) ~~Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur;~~
4) ~~Meningkatkan tatakelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.~~

~~Tujuan pembangunan kemaritiman sebagaimana tersebut di atas, dapat dicapai apabila terjadi kondisi sebagai berikut:~~

1) ~~**Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang mandiri**, disegani dan memiliki pengaruh kuat di forum internasional, berdaulat penuh atas wilayah lautnya dan mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam memanfaatkan potensi dan mengatasi berbagai masalah kemaritiman demi mencapai tujuan bernegara, tanpa harus menutup diri terhadap kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Kedaulatan di bidang maritim ditandai dengan tingginya peran aktif Indonesia di bidang kemaritiman, minimnya pelanggaran kedaulatan di laut, dan rendahnya angka korban selamat dari bencana/kecelakaan di laut.~~
2) ~~**Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang kuat,** ditandai dengan berkembangnya ekonomi berbasis kemaritiman yang didukung oleh infrastruktur dan konektivitas maritim yang maju dan seimbang antar kawasan, sistem logistik maritim yang efisien, produksi sumber daya alam kelautan yang bernilai tambah tinggi, dan berkembangnya~~

~~industri serta jasa maritim berbasis teknologi maju. Kondisi itu diharapkan akan mendorong peningkatan kontribusi PDB kemaritiman dalam struktur perekonomian nasional.~~

~~3) **Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang maju**, yang memiliki keunggulan di bidang IPTEK, literasi maritim, SDM yang inovatif dan berkarakter bangsa bahari serta menjunjung tinggi budaya nusantara sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, daya saing bangsa juga ditandai oleh kemampuan menyediakan sumberdaya atau modal pembangunan dalam bentuk pendanaan, kelembagaan dan sistim tatakelola laut yang baik (*good ocean governance*).~~

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis yang diwujudkan melalui pemetaan menggunakan tools BSC. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 12 sasaran strategis yang dikelompokkan kedalam 4 perspektif BSC. Sasaran strategis pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan kondisi yang diinginkan dan akan dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut

Stakeholder Perspective

SS 1.1 Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional, dengan indicator kinerja

SS 1.2 Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional sesuai target

SS 1.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Customer Perpective

SS 2.1 Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan

SS 2.2 Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif

SS 2.3 Tingkat ketersediaan permodalan industri pariwisata dan industri kreatif

SS 2.4 Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas Kekayaan Intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

SS 2.5 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Internal Business Perpective

SS 3.1 **Efektifitas rancangan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien**

Learn and Growth Perspective

SS 4.1 **Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

SS 4.2 **Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan EKonomi Kreatif**

SS 4.3 **Terlaksananya Administrasi Keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2024	Unit Pelaksana
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	SS1.1	Teguhnya jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat	Maritime Leadership Index/ Indeks Kepemimpinan Maritim	Nilai	>=3	>=3	Seluruh Deputi
	SS1.2	Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekenomian nasional	PDB Maritim	%	6,04	7,80	Seluruh Deputi
	SS1.3	Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	Nilai	64,6	66,0	Seluruh Deputi
CUSTOMER PERSPECTIVE	SS2.1	Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional	Indeks Kedaulatan Maritim	Nilai	3	4	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
	SS2.2	Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis	Indeks Kinerja Logistik	Nilai	3,1	3,5	Deputi Bidang Koor. Infrastruktur dan Transportasi
			Indeks Disparitas Ekonomi	Nilai	-0.17	~0	1. Deputi Bidang Koord. Infrastruktur dan Transportasi 2. Deputi Bidang Koor Invest & Pertambangan
	SS2.3	Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Indeks Kesehatan Laut	Nilai	65	67	Deputi Bidang Koordinasi SD Maritim

			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	66,5	68.53	Deputi Bidang Koor. Pengelolaan LHK
	SS2.4	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam	PDB Sektor SDA dan Jasa	Nilai	15.37	17.73	Seluruh Deputi
			Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Nilai	43,3	50	Deputi Bidang Koor. Infrastruktur dan Transportasi
	SS2.5	Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara	Indeks Kapabilitas Inovasi	Nilai	37,7	41,5	1. Deputi Bidang Koor. SD Maritim 2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SS3.1	Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	%	100	100	Seluruh Deputi
	SS3.2	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	%	100	100	Seluruh Deputi
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	SS4.1	Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	%	Belum diukur	81	Sekretariat Kemenko
	SS4.2	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Marves yang Baik	Indeks RB	Nilai	69,13	95	Sekretariat Kemenko
	SS4.3	Terbangunnya SPBE di Kemenko Kemaritiman yang baik	Indeks SPBE	Nilai	2,07	4,0	Sekretariat Kemenko
	SS4.4	Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel	Tingkat Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	Sekretariat Kemenko

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah pembangunan 5 tahun dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Terdapat 4 pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yaitu Kelembagaan Politik dan Hukum yang mantap, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Pilar-pilar tersebut dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan berupa Prioritas Nasinoal (PN) yaitu:

1) PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dna berkeadilan.
2) PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3) PN 3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4) PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5) PN 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6) PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7) PN 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Faktor regulasi yang mengarahkan dan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
5) Perpres Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
6) Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2025;
7) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah *"…. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif harus bisa memberi kontribusi pada tujuan negara tersebut.

Pasal 25A UUD 1945 menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*". Hal ini memberikan arahan bahwa pembangunan Kemaritiman harus memperhatikan realitas bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara continental (*continental state*).

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah **"INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"**. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut

harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang disyahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut, memiliki 8 (delapan) misi pembangunan, sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan 28ersatu
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional;

Pembangunan Kemaritiman dan Investasi terkait dengan misi ke 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Misi ke-7 ***Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional***, diarahkan untuk:

a. menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;
b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
c. mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan
d. membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mewujudkan Visi, Misi Presiden serta agenda pembangunan nasional telah dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2020. Ketujuh (7) agenda tersebut dapat dijabarkan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.1. Tujuh (7) Agenda Pembangunan Nasional yang terkait erat dengan Koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Di dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, terdapat Janji prioritas Presiden yang telah dijabarkan kedalam Program Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan Nasional 1 yaitu **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**, terdapat Program Prioritas yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan EKonomi Kreatif yaitu Peningkatan Nilai Tambah Lapangan kerja dan investasi di sekor riil dan industrialisasi.

2. Agenda Pembangunan Nasional 2 yaitu **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**, melalui program prioritas yang dikoordinasikan mencakup pembangunan wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua yang terkait pembangunan Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Gambar 3.3 Agenda Pembangunan 2

3. Agenda Pembangunan Nasional 3 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**, melalui program prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, 2) Mengentaskan Kemiskinan, 3) Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing

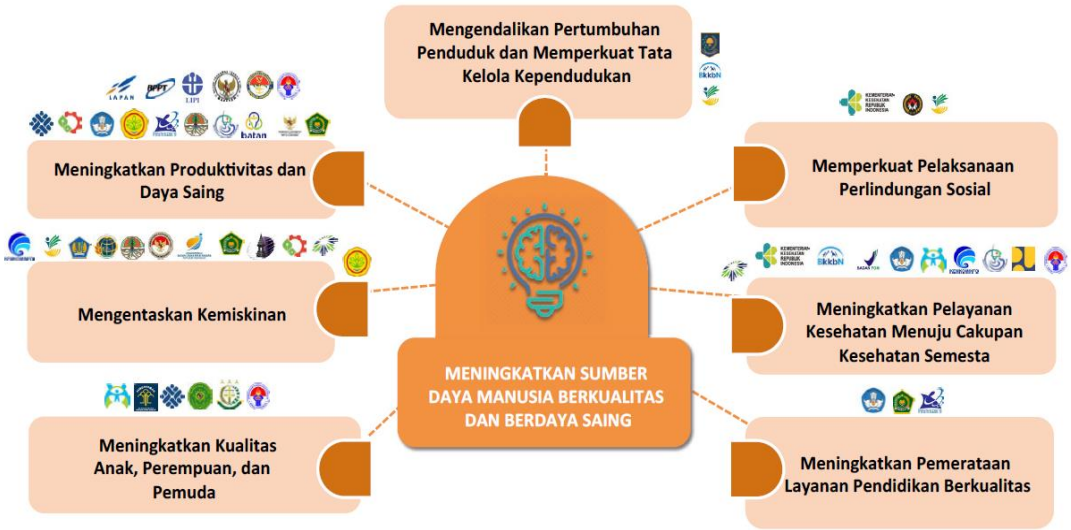

4. Agenda Pembangunan Nasional 4 yaitu **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, melalui program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2) Meningkatkan Pemajuan Budaya dan Pelestarian Kebudayaan.

Gambar 3.5 Agenda Pembangunan 4

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat tugas untuk melaksanakan pengawalan terhadap sejumlah Proyek Prioritas Nasional (*Major Project*) dalam Program Prioritas RPJMN 2020-2024 seperti pada gambar dibawah ini.

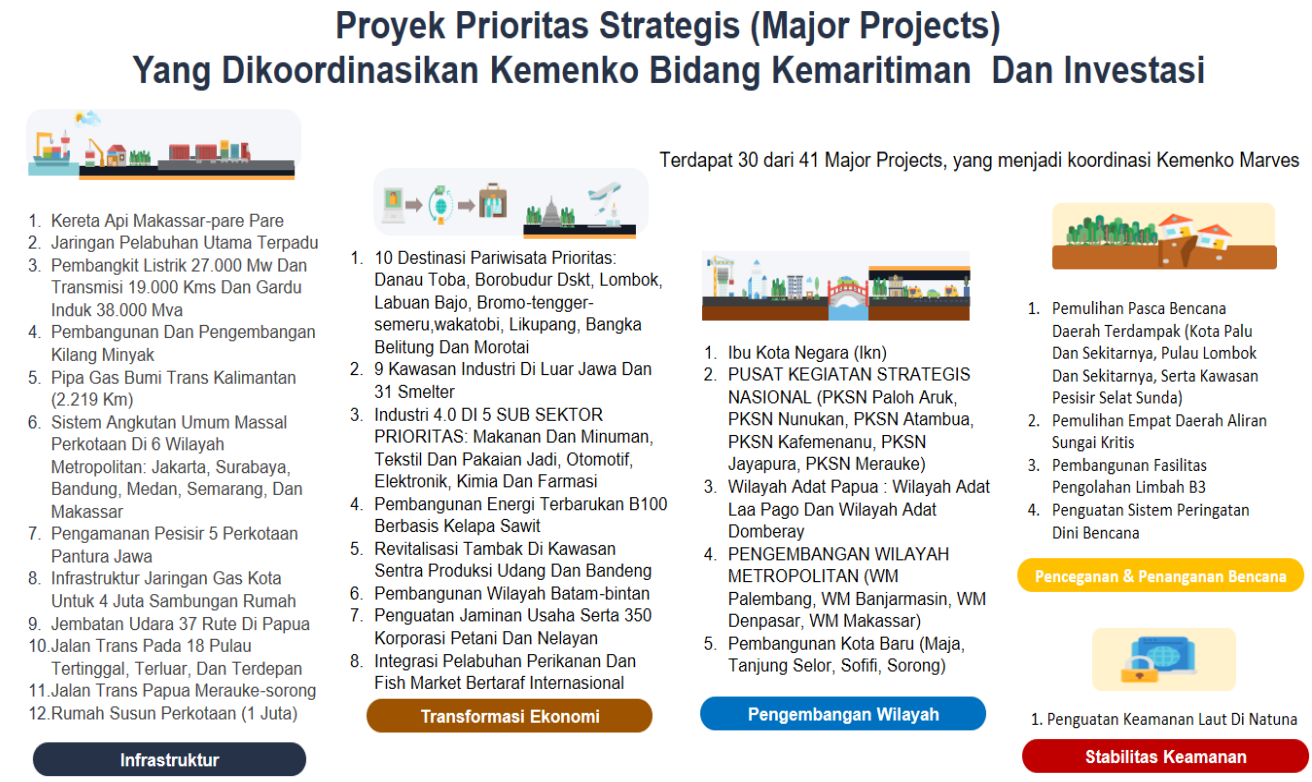

Sumber : Bappenas

Gambar 3.8 Proyek Prioritas Nasional (*Major Project*) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024

Dari daftar Proyek Prioritas Nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenkterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut, ada 2 yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu:

1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, Bangka Belitung, dan Morotai.
2) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, serta Kimia dan Farmasi.

Disamping itu terdapat sejumlah isu strategis lintas Kementerian/Lembaga yang koordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain:

No	Issue	K/L Terkait	Unit Kerja
1	Destinasi Pariwisata	Kemenparekraf, Kemenhub, PUPR	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Pembangunan Marina, Cruise, dan Yacht	KEMENPAREKRAF, PUPR, KEMENHUB	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi suatu organisasi menjadi gambaran arah pelaksanaan program dan kegiatan. Arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan juga akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional terkait lainnya yang ditetapkan dalam periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terdapat 5 (lima) agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan sebagaimana diuarikan diatas, selama periode jangka menengah melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yaitu:

1. **Penguatan Industri dan Jasa Kemaritiman**

Pencapaian agenda pembangunan Penguatan Industri dan jasa Kemaritiman dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, diwujudkan melalui strategi: Pemenuhan energi dan terwujudnya ketahanan energi
b. Meningkatnya Kemandirian Industri Penunjang Infrastruktur, Maritim, dan Transportasi, diwujudkan melalui strategi:
   1) Meningkatkan produktifitas industri penunjang Infrastruktur
   2) Meningkatkan Industri Maritim dan Industri Transportasi
c. Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, diwujudkan melalui strategi:
   1) Meningkatkan ketersediaan permodalan industri pariwisata dan industri kreatif
   2) Mewujudkan Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual bagi para pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional, diwujudkan melalui strategi: Mewujudkan kemudahan investasi yang mampu menggerakan ekonomi nasional.

   Sedangkan untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa dibidang kemaritiman arah kebijakannya:

e. Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan, diwujudkan melalui strategi:
   1) Menciptakan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang
   2) Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari
f. Meningkatkan manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya Parekraf, dilaksanakan dengan fokus *meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif*
g. Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sektor pertambangan, diwujudkan melalui strategi: meningkatkan produksi dan nilai tambah pertambangan

2. Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sejarah mencatat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut ulung dan telah menguasai teknologi perkapalan. Kekuatan sumberdaya manusia yang mebyuasai teknologi menghasilkan peradaban yang tinggi. Oleh karena itu arah kebijakan yang terkait sumberdaya manusia adalah untuk memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara. Pencapaian agenda pembangunan Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan inovasi yang berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumberdaya maritim, diwujudkan melalui strategi: Meningkatkan hilirisasi perikanan, kelautan dan penunjangnya.
b. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF), diwujudkan melalui strategi: Menyediakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bersertifikat Kompetensi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF).

Pada subbab 2.2 telah dirumuskan Misi yang merupakan aktivitas berkelanjutan yang membuat Visi menjadi kenyataan. Untuk itu pelaksanaan Misi ini harus direncanakan melalui Strategi yang baik, yang diyakini mampu mampu mempercepat pencapaian visi dan mengarahkan tujuan organisasi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya, berikut ini rumusan strategi Pembangunan Kemaritiman dan Investasi untuk perode 5 tahun, dalam kurun waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. ~~**Menegakkan kedaulatan Maritim secara luas**, melalui jalan diplomasi, penegakan hukum, memperkuat perjanjian maritim, peningkatan keamanan laut, peningkatan keselamatan maritim serta serta penyelenggaraan kegiatan yang secara efektif mencerminkan tegaknya kedaulatan maritim.~~
2. **Mengembangkan Ekonomi berbasis negara kepulauan,** yaitu membangun infrastruktur dan konektivitas maritim untuk pemerataan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing industri maritim yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan barang dan jasa serta peningkatan nilai tambah suberdaya.
3. **Membangun karakter Bangsa Bahari,** yaitu dengan memperkuat inovasi maritim dan budaya bahari nusantara melalui pengembangan sumberdaya manusia dan iptek yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan penguatan karakter bangsa.

Untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibuat dan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang dirumuskan, maka disusunlah **Agenda Pengembangan Kemaritiman** sebagai berikut:

1. ~~**Penegakan Kedaulatan Maritim,** agenda ini dilaksanakan melalui pengembangan diplomasi yang efektif, penguatan ketahanan maritim, dan penyelenggaraan *effective occupation* di wilayah maritim.~~
2. ~~**Pembangunan Berdimensi Negara Kepulauan,** agenda ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dan investasi yang berorientasi pemerataan wilayah negara kepualuan guna mengurangi kesenjangan dan disparitas antar kawasan serta meningkatkan konektivitas antar wilayah;~~
3. **Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan,** agenda ini dijalankan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Sustainable Development Goals*);
4. **Pengembangan Industri Maritim,** agenda pengembangan industri maritim harus berorientasi kemandirian dan peningkatan nilai tambah sumberdaya;

5. **Pengembangan SDM dan Iptek,** agenda memajukan sumberdaya manusia ini harus berorientasi pada penguatan karakter bangsa bahari.

Kelima agenda pembangunan tersebut berisikan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui koordinasi dan pengendalian yang akan dilaksanakan. Selain itu pula memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2015-2019 yang lalu, maka Kemenko Marves juga akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional terkait lainnya yang ditetapkan dalam periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

3.3. Kerangka Regulasi

Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mengacu pada sejumlah peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
2.

Arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bidang regulasi ini antara lain:

1. melakukan reviu terhadap semua peraturan yang terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. melakukan *lack analysis* kebutuhan peraturan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. mengevaluasi kemungkinan potensi tumpang-tindih peraturan yang telah ada.
4. mengusulkan penyusunan peraturan baru untuk melengkapi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhannya;
5. melakukan harmonisasi peraturan jika terdapat pengaturan yang tidak sinkron antar peraturan berdasarkan reviu dan/atau kajian dan mengusulkan rancangan peraturan perubahannya;
6. memantau tindak lanjut peraturan, termasuk konvensi dan perjanjian internasional, di bidang kemaritiman.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai meliputi lembaga koordinasi, regulator, eksekutor, dan pengendalian antara lain:

a. **Lembaga Koordinasi/*Coordinating Agency***

Lembaga koordinasi adalah lembaga pemerintah yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam pembuatan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada saat ini lembaga yang menjalankan adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan dalam hal perencanaan pembangunan, koordinasi juga dilaksanakan oleh Bappenas.

b. **Lembaga Regulator/*Regulating Agency***

Lembaga regulator adalah lembaga pemerintah yang membangun tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif, efisien, dan berdayaguna sangat diperlukan. Fungsi ini diberikan kepada K/L yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. **Lembaga Pelaksana/*Executing Agency***

Lembaga pelaksana adalah K/L pemerintah dan/atau badan usaha yang melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan/atau menjalankan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi keratif yang dijalankan oleh K/L yang memiliki tugas teknis tertentu. Selain K/L, tugas ini juga dilaksanakan oleh badan usaha yang diberi mandat pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. **Lembaga Pengendali/*Controlling Agency***

Lembaga pengendalian adalah lembaga negara yang melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif guna memastikan kebijakan dan program pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak yang positif.

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

a. Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis Kemenko Marves tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis (ISS)

Perspective	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Baseline 2019**		**Target**					**Unit Pelaksana**
						2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	SS1.1										Seluruh Deputi
	SS1.2	Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan **kuat** sebagai penggerak utama perekenomian nasional	PDB Maritim	%	6,04	6.31	6.63	6.99	7.41	7,80	Seluruh Deputi
	SS1.3	Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	Nilai	64,6	64.6	65	65.4	65.8	66,0	Seluruh Deputi
CUSTOMER PERSPECTIVE	SS2.1										
	SS2.2						~~3.2~~	~~3.3~~	~~3.4~~	~~3,5~~	
	SS2.										

	3										
	SS2.4	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	Nilai	15.37	15.86	16.31	16.79	17.19	17.73	Seluruh Deputi
	SS2.5	Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara	Indeks Kapabilitas Inovasi	Nilai	37,7	38	38.6	39.5	40.5	41,5	1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SS3.1	Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	Seluruh Deputi
	SS3.2	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efien	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Seluruh Deputi
WTP 2,07LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	SS4.1	Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	%	belum diukur	71	73	75	78	81	Sekretariat Kemenko
	SS4.2	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Marves yang Baik	Indeks RB	Nilai	69,13	75	80	85	90	95	Sekretariat Kemenko
	SS4.3										
	SS4.4	Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel	Tingkat Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Kemenko

b. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur pencapaian hasil (outcome) dari suatu program yang telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan sasaran program (outcome).

Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Program (IKP)

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Unit Pelaksana Eselon I
				2020	2021	2022	2023	2024	
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	40	40	40	40	40	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

c. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran alat ukur pencapaian keluaran (output) suatu kegiatan yang telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan sasaran kegiatan (output).

Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Unit Pelaksana Eselon II
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan									
1	Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindak lanjut Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	3	4	5	6	7	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
2	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindak lanjut Kebijakan	3	4	5	6	7	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

			Pengem bangan Ekonomi Kreatif						
3	Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomen dasi atau Rumusan Tindak lanjut Kebijakan Akses Permodal an Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	4	5	6	7	Asisten Deputi Akses Permodal an Pari wisata dan Ekonomi Kreatif
4	Koordinasi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomen dasi atau Rumusan Tindak lanjut Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	4	5	6	7	Asisten Deputi Kekayaan Intelek tual Pari wisata dan Ekonomi Kreatif

5	Koordinasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindak lanjut Kebijakan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	4	5	6	7	Asisten Deputi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	2	2	2	2	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.2 Kerangka Pendanaan

a. Pendanaan melalui APBN dan APBD, diutamakan untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dasar pariwisata dan ekonomi kreatif.
b. Pendanaan melalui PHLN, diutamakan untuk kegiatan yang belum teralokasikan melalui skema APBN dan APBD.
c. Pendanaan melalui Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri, diutamakan untuk pengembangan industri berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penggunaan APBN harus dilakukan dengan fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran.

BAB 5
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Agenda Pembangunan Nasional yang terdiri dari Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas serta Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang akan dilaksanakan maupun dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan Misi ke Tujuh yaitu **Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional.** Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini dilaksanakan dalam kerangka Organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pembangunan di bidang kemaritiman tahun 2015-2019 serta hal-hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan Kemaritiman dan Investasi untuk 5 tahun kedepan dalam RPJMN 2020-2024, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan bidang kemaritiman dan Investasi melalui penjabaran kedalam Rencana Kerja tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Renstra ini agar menjadi arah dan pedoman perencanaan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam membangun kerjasama dan sinergitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**

Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan EKonomi Kreatif

Tahun 2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Oucome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Akokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								**259,596**	**298,536**	**343,316**	**394,814**	**454,036**	
SS 1	Teguhnya jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat												
	Indeks Kepemimpinan Maritim (Maritime Leadership Index)		>=3	>=3	>=3	>=3	>=3						Kemenko
SS 2	Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekenomian nasional												
	Kontribusi PDB Maritim		6.31	6.63	6.99	7.41	7.80						Kemenko
SS 3	Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur												
	Indeks Daya Saing Global (IDSG)		64.6	65.0	65.4	65.8	66.0						Kemenko
SS 7	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam												
	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa		15.86	16.31	16.79	17.19	17.73						Seluruh Deputi
SS 8	Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara												

	Indeks Kapabilitas Inovasi		38.0	38.6	39.5	40.5	41.5						Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS 9	Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien												
	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan		100	100	100	100	100						Kemenko
SS 10	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisen												
	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100						Kemenko
SS 11	Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional												
	Indeks Profesionalitas ASNi		71	73	75	78	81						Kemenko
SS 12	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Maritim dan Investasi yang Baik												
	Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenko maritime		75	80	85	90	95						Kemenko
SS 13	Terbangunnya SPBE yang baik di Kemenko Kemaritiman dan Investasi												
	Indeks SPBE		3.0	3.3	3.6	3.8	4.0						Kemenko
SS 14	Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel												

	Tingkat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Kemenko
Program B: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan													
	Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim, sumberdaya alam dan jasa, infrastruktur dan SDM, Iptek dan budaya maritim												
	Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang kedaulatan maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Trnasportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya		100	100	100	100	100	87,255	100,343	115,394	132,704	152,609	Seluruh Deputi
	Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindaklanjuti		15	20	25	30	35	10,000	11,500	13,225	15,209	17,490	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan 25 : Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan													

	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan												Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan		3	4	5	6	7	2,000	2,300	2,645	3,042	3,498	
Kegiatan 26 : Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif		3	4	5	6	7	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	
Kegiatan 27 : Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3	4	5	6	7	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	
Kegiatan 28 : Koordinasi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													

	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3	4	5	6	7	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	
Kegiatan 29 : Koordinasi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3	4	5	6	7	1,250	1,438	1,653	1,901	2,186	
Kegiatan 30 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2	2	2	2	2	3,000	3,450	3,968	4,563	5,247	